



LAPORAN HASIL PENELITIAN

Judul :

**IDENTIFIKASI PERENCANAAN TRANSPORTASI
KOTA SEMARANG, DITINJAU DARI PERAN
DAN WEWENANG INSTANSI YANG TERLIBAT**

Disusun oleh :

TIM PENELITI

**FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS DIPONEGORO
1994/1995**

Dibiayai oleh Dana DPP Universitas Diponegoro Semarang, Tahun Anggaran 1994/1995
Nomor : 615/PT09.H8/N/1994, tanggal 23 Agustus 1994
LEMBAGA PENELITIAN UNDIP
1994/1995

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Identifikasi Perencanaan Transportasi Kota Semarang, Ditinjau dari Peran dan Wewenang Instansi Yang Terlibat.
- b. Macam Penelitian : Pengembangan
- c. Kategori Penelitian : Penelitian untuk Menunjang Pembangunan
2. Kepala Proyek Penelitian :
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Ir. Eko Mujihartono, MSP
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Golongan Pangkat, NIP : III B / 131 764 879
- d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- e. Fakultas / Jurusan : Teknik / Teknik Sipil
- f. Bidang Ilmu : Teknik
3. Susunan Tim Peneliti : Ir. Moga Narayudha, Sp1
Ir. Djoko Purwanto, MS
Ir. Eko Mujihartono, MSP
4. Lokasi Penelitian : Kotamadia Semarang
5. Lama Penelitian : 6 (Enam) bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 750. 000,-
(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
7. Dibiayai melalui proyek : DPP UNDIP Semarang tahun Anggaran 1994/1995
Semarang, Januari 1995

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

(Ir. Soerjono, Dipl.HE)

NIP. 130 350 521

Kepala Proyek Penelitian

(Ir. Eko Mujihartono, MSP)

NIP. 131 764 879

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Diponegoro

(Prof. Dr.dr.Ag. Soemantri H.)

NIP. 130 237 480

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penelitian ini. Penelitian ini terlaksana atas adanya bantuan Dana DPP Universitas Diponegoro Semarang, Tahun Anggaran 1994 / 1995, Nomor : 615/PT09.H8/N/1994, tertanggal 23 Agustus 1994.

Adapun masalah yang dicoba untuk ditelaah adalah di bidang transportasi perkotaan dengan judul Identifikasi Perencanaan Transportasi Kota Semarang, ditinjau dari peran dan wewenang instansi yang terlibat.

Masalah koordinasi merupakan masalah krusial / klasik yang dapat dijumpai pada setiap kegiatan. Hal ini berlaku pula pada kegiatan perencanaan transportasi di Kota Semarang. Adapun koordinasi ini akan ditelaah berdasarkan peran dan wewenang instansi yang terlibat di dalam perencanaan transportasi di Kota Semarang. Untuk keperluan tersebut, maka perlu ditemukeni faktor-faktor yang menunjang adanya koordinasi tersebut, seperti tata guna lahan, sarana dan prasarana transportasi serta masyarakat sendiri sebagai pengguna jalan.

Kami sadar bahwa apa yang tertulis dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna, baik dalam sistematika maupun isinya. Untuk itu kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi sempurnanya tulisan ini.

Akhirnya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Semarang,

1995

Penulis

RINGKASAN PENELITIAN

Transportasi perkotaan selain sebagai dasar pemenuhan kebutuhan perjalanan bagi tujuan-tujuan masyarakat kota, juga mempunyai tujuan yang lebih luas lagi yaitu sebagai tujuan kota. Tujuan masyarakat dimaksudkan untuk memenuhi keperluan kehidupan dan penghidupan sehari-hari, dan sebagai tujuan kota dimaksudkan untuk menyebarkan dan meningkatkan kemudahan pelayanan, memperluas kesempatan perkembangan kota, serta meningkatkan daya guna penggunaan sumber-sumber yang ada.

Suatu kenyataan bahwa permintaan pelayanan yang disediakan untuk menunjang sistem transportasi kota selalu tidak diimbangi dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini tercermin dengan adanya sistem peraturan dan pengaturan yang belum mantap, dan belum sinkronnya kerja sama antar instansi yang terkait, dalam kegiatan transportasi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan adanya koordinasi antar instansi yang terlibat.

Dari kajian terhadap koordinasi perencanaan transportasi Kota Semarang ini, diharapkan akan ditemukan pengaruh dari masing-masing instansi yang terlibat di dalam menanggulangi transportasi di Kotamadya Dati II Semarang.

Adapun instansi-instansi yang terlibat di dalam kegiatan transportasi di Kotamadya Dati II Semarang yang akan dikaji, diantaranya : BAPPEDA, Dinas Tata Kota, DPU, Dipenda, DLLAJR, Perum DAMRI, Dirjen Bina Marga, Satpolantas Kotabes Semarang, Bagian Hukum Kotamadya Dati II Semarang dan Perum Kereta Api Daop IV Wilayah Jawa.

Usaha-usaha yang dilakukan guna terciptanya suatu koordinasi di dalam sistem transportasi perkotaan itu bertujuan untuk memastikan hubungan yang baik dan teratur secara menyeluruh, antar instansi yang terlibat di dalamnya sesuai dengan fungsi peran dan wewenangnya.

SUMMARY

Urban Transportation is not only as basic fulfilment of urban trip requirement for urban society objective, but also has broader as urban objective.

The society objective is concerned to fulfil required urban activity, and as urban objective is concerned to spread out and improvement urban services, urban growth, and also improvement efficiency of existing resources.

In fact, it's difficult get balance between transportation demands and transportation supply. That's shown as in unsteady regulation system, and unsynchronized coordination of involved departments.

The analysis of transportation planning coordination in Semarang can be identified by influence of each departments on the solved transportation problem.

The departments involve in the coordination transportation system in Semarang, such as, Bappeda, Dinas Tata Kota, DPU, Dipenda, DLLAJR, Perum DAMRI, Dirjen Bina Marga, Satpolantas Kotabes Semarang, and Perum Kereta Api Daop IV Java.

Effort to coordinate urban transportation system is to ensure integrated coordination and comprehensive approach planning on inter departments involving in the transportation system in their functions, job description and their authority.

DAFTAR ISI

		Halaman
Halaman Judul		i
Lembar Pengesahan		ii
Kata Pengantar		iii
Ringkasan Penelitian		iv
Summary		v
Daftar Isi		vi
Daftar Tabel		viii
Daftar Diagram/Skema		ix
Daftar Peta/Gambar		x
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	TINJAUAN PUSTAKA	2
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4	METODE PENDEKATAN	5
1.5	SISTEMATIKA PELAPORAN	8
BAB II	KETERLIBATAN INSTANSI DALAM PERENCANAAN TRANSPORTASI	
2.1	PERAN DAN WEWENANG INSTANSI YANG TERLIBAT	8
2.2	KETERLIBATAN MASING-MASING INSTANSI	8
2.3	HUBUNGAN ANTAR INSTANSI YANG TERLIBAT	11
2.4	KOORDINASI PERENCANAAN TRANSPORTASI	15
BAB III	KOORDINASI SISTEM TRANSPORTASI KOTA SEMARANG	
3.1	PENELITIAN DAN PEENCANAAN TATA GUNA LAHAN DAN PRASARANA	20
3.2	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA GUNA LAHAN DAN PRASARANA	23
3.3	PENELITIAN DAN PERENCANAAN SARANA TRANSPORTASI	35

	Halaman
3.4 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN SARANA TRANSPORTASI	39
3.5 PENELITIAN OPERASI TRANSPORTASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	42
3.6 PERENCANAAN OPERASI TRANSPORTASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	
3.7 PELAKSANAAN OPERASI TRANSPORTASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	48
3.8 PENGAWASAN OPERASI TRANSPORTASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	51
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 TATA GUNA LAHAN DAN PRASARANA	57
4.2 SARANA TRANSPORTASI	59
4.3 OPERASI TRANSPORTASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	60
4.4 KOORDINASI PERENCANAAN TRANSPORTASI KOTA SEMARANG	63

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
2.1	PERAN DAN WEWENANG INSTANSI YANG TERLIBAT DALAM PERENCANAAN TRANSPORTASI	9
2.2	KETERLIBATAN INSTANSI MENURUT TAHAPAN DAN MATERI	12
2.3	MATRIKS ARUS INSTANSI ANTAR INSTANSI	13
3.1	PANJANG JALAN BERDASARKAN KELAS JALAN DI KOTAMADYA DATI II SEMARANG TAHUN 1992	33

DAFTAR DIAGRAM/SKEMA

No. Diagram/Skema	Judul	Halaman
1.1	DIAGRAM HUBUNGAN ANTARA SISTEM AKTIVITAS, SISTEM TRANSPORTASI DAN SISTEM KELEMBAGAAN	3
2.1	DIAGRAM HUBUNGAN ANTAR INSTANSI DALAM KEGIATAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN PRASARANA JALAN	18
2.2	DIAGRAM HUBUNGAN ANTAR INSTANSI DALAM KEGIATAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN SISTEM RAMBU-RAMBU LALU-LINTAS	19

DAFTAR PETA/GAMBAR

No. Peta/Gambar	Judul	Halaman
3.1	RENCANA TATA GUNA TANAH KOTAMADYA DATI II SEMARANG TAHUN 2000	24
3.2	ARAH KECENDERUNGAN PERKEMBANGAN PENDUDUK	26
3.3	POLA JARINGAN JALAN	31
3.4	FUNGSI JALAN	32
3.5	LEBAR JALAN	34

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Semarang yang mempunyai luas 37.370 Ha dengan peningkatan penduduk rata-rata 2,33 % per tahun dari tahun 1980 - 1993, sampai akhir tahun 1993, penduduknya berjumlah 1.227.032 jiwa. Peningkatan penduduk tersebut menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang (sosial, ekonomi dan politik), yang berakibat pula pada peningkatan intensitas pergerakan penduduk yang terjadi di Kota Semarang.

Berdasarkan Revisi RIK 1975-2000, peningkatan kendaraan bermotor di Kota Semarang rata-rata sekitar 4,29 % per tahun. Di sisi lain peningkatan panjang jaringan jalan hanya sekitar 3,40 % per tahun. Hal ini mengakibatkan kapasitas jaringan jalan di Kota Semarang sebagian besar kurang memadai. Keadaan tersebut menjadi lebih parah dengan adanya jaringan jalan yang digunakan untuk lalu-lintas campuran, parkir pada badan jalan, dan kurang tersedia jalur pemisah antara lalu-lintas lambat dengan lambat cepat.

Disamping itu, konstruksi jaringan jalan yang ada di Kota Semarang kurang mampu menahan beban berat, sehingga banyak jaringan jalan yang tidak sesuai dengan fungsi yang diembannya.

Di sisi lain dengan munculnya penggunaan lahan pada beberapa sektor kegiatan seperti kegiatan perdagangan, perkantoran dan perumahan di beberapa tempat di wilayah Kotamadya Dati II Semarang, sering menimbulkan permasalahan pada kegiatan transportasi, seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu-lintas. Kesemuanya ini membuat tingkat pelayanan jaringan di Kota Semarang menjadi